HARIAN UMUM NusaBali

Tak Mau Disebut *Gabeng* Lagi

★ Pansus Aset Siap Kembali Usut Aset Pemprov di Bali Hyatt Sanur

Pansus Aset saat ini dibuat dengan pola khusus untuk pengungkapkan kasus per kasus

DENPASAR, NusaBali

Pengusutan aset Pemprov Bali di kawasan Hotel Bali Hyatt, Sanur, Denpasar Selatan yang terkesan *gabeng* (tak jelas) padahal sudah dua kali Pansus Aset dibentuk dengan pimpinan berbeda, membuat Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama 'panas'. Saat memimpin rapat Pansus Aset DPRD Bali dengan Pemprov Bali, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak Bali Hyatt di Gedung DPRD Bali, Rabu (13/6), Adi Wiryatama menegaskan Pansus Aset yang kali ini dibentuk tidak mau *gabeng* lagi.

Pertemuan Pansus Aset dengan eksekutif dan pihak terkait kemarin dari awal sampai akhir berlangsung tegang. Pansus Aset yang membidik aset Pemprov Bali 2,5 hektare di kawasan Hotel Bali Hyatt Sanur itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry, Ketua Pansus I Nyoman Adnyana, anggota Pansus I Nyoman Tirtawan, I Ketut Kariyasa Adnyana. Sementara dari Pemprov Bali hadir Karo Aset dan Keuangan Pemprov Bali Ida Bagus Ngurah Arda, mantan Karo Aset Pemprov Bali I Ketut Adiarsa, Sekkot Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Iswara, perwakilan BPN Wilayah Bali Subarjo, dan Kuasa Hukum PT Wyncor Ronny Jannis.

Adi Wiryatama berbicara kencang soal kinerja Pansus Aset yang tidak akan main-main. Dia sempat kecewa karena Sekda Tjok Pemayun yang diundang tak hadir. "Kenapa terus bilang izin tidak hadir. Besok kalau dipanggil wajib memastikan hadir. Ini masalah penting. Masalah aset rakyat Bali yang lama-kelamaan kalah dengan swasta," ujar politisi PDI Perjuangan yang mantan Bupati Tabanan 2 periode ini.

Adi Wiryatama mengatakan, Pansus Aset saat ini dibuat dengan pola khusus untuk pengungkapkan kasus per kasus. Yang utama diusut adalah aset Pemprov Bali di Bali Hyatt. "Mungkin kalau Pansus Aset sebelumnya *gabeng*, Pansus ini saya tegaskan serius," tegas politisi gaek yang Sekretaris Deperda DPD PDIP Bali ini. Adi Wiryatama bahkan menegaskan akan merekomendasikan agar diusut penegak hukum. "Bila perlu dalam mengusut kasus ini kami akan undang KPK," imbuhnya.

Karo Aset IB Arda lebih dulu angkat

Edisi : Rabu, 14 Juni 2017

Hal : 3

HARIAN UMUM
NusaBali

bicara menjelaskan kronologi aset Pemprov Bali di Bali Hyatt Sanur. Aset Pemprov Bali di Bali Hyatt yang akhirnya menjadi kepemilikan saham buat Pemprov Bali itu juga diungkap. Namun penjelasan IB Arda jadi terputus karena anggota Pansus Nyoman Tirtawan angkat bicara. "Banyak kejanggalan dan konspirasi dalam masalah aset Pemprov Bali ini," ujar politisi Partai NasDem Bali ini.

Tirtawan mengatakan ada 2,5 hektare aset Pemprov Bali di Bali Hyatt yang dengan mudah menjadi saham. Tirtawan mengatakan saat dijadikan saham melibatkan PT Sanur Bali Resort, Yayasan Bina Budaya. "Ada 200 lembar saham, sekarang kemana saham itu? Deviden kemana? Jelas ada perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara. Ini sudah bisa diusut sebagai tindak pidana korupsi," kata politisi asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ini.

Tirtawan menyebutkan dalam peralihan aset ada Permendagri Tahun 1972 yang memastikan pelepasan atau peralihan aset wajib atas seizin Mendagri. Dalam masalah aset Pemprov Bali di Bali Hyatt tidak ada. "Tidak pernah ada ada izin dari Mendagri," ungkap anggota Komisi I DPRD Bali ini.

Anggota Pansus Aset Kariyasa Adnyana tak kalah keras lagi. Politisi PDIP asal Desa Busungbiu Kabupaten Buleleng ini mengatakan, kronologi atas aset Pemprov Bali belum bisa diuji faktanya. "Bisa saja alurnya dibuat dengan alur yang nantinya terkesan tidak ada masalah. Karena kronologi ini tidak jelas siapa yang buat. Kalau BPN mau tolong Kanwil BPN suruh tanda tangan basah dengan stempel resmi BPN. Berani nggak?" tantang Kariyasa Adnyana.

Ketua Pansus Nyoman Adnyana kemarin meminta agar BPN memberikan data dan kronologi aset Pemprov Bali di Bali Hyatt kepada pimpinan dewan. Kemarin terungkap juga oleh pihak PT Wincorn pada peralihan Sekda atas nama I Wayan Sembah Subakti Tahun 1974, aset sudah dilepas. Adalah perwakilan PT Wincorn Ronny Jannis yang menunjukkan peralihan itu.

Namun anggota Pansus Aset Tirtawan mematahkannya. "Itu sudah batal demi hukum, lantaran bertentangan dengan aturan di atasnya yaitu Permendagri, yang mewajibkan adanya persetujuan Mnedagri untuk melepas aset," ujar Tirtawan.

Atas kondisi ini Adi Wiryatama menutup pertemuan dengan mengagendakan rapat kembali untuk menghadirkan Kanwil BPN Bali, Sekda Bali, dan PT Sanur Bali. **nat**

Edisi : Rabu, 14 Juni 2017

Hal : 3

HARIAN UMUM NusaBali

Bupati Eka Wiryastuti Serahkan 19,46 Ton CBP

TABANAN, NusaBali

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menyerahkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secara simbolis kepada perwakilan nelayan Tabanan di Pantai Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, Selasa (13/6). Penyerahan CBP tahun ini adalah yang kelima kalinya dengan total CBP yang disalurkan sebanyak 19,46 ton beras kepada 63 kelompok nelayan dengan jumlah anggota sebanyak 931 kepala keluarga atau 3.476 jiwa.

Bupati Eka Wiryastuti berharap dengan penyaluran CBP ini dapat mengurangi beban nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nelayan di Tabanan sejak beberapa bulan tak bisa melaut karena cuaca ekstrem, gelombang besar, dan angin kencang. Penyerahan CBP dihadiri Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Asisten II Setda Tabanan I Wayan Miarsana, Anggota DPRD Tabanan I Made Dirga, Perwakilan Bulog, Pewakilan PT Jasindo, para Kepala OPD, dan camat.

Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tabanan I Ketut Arsana Yasa melaporkan, adanya cuaca buruk, angin kencang, dan gelombang tinggi dari bulan Januari hingga Februari, berdampak kepada para nelayan. Selama cuaca buruk itu nelayan tidak bisa melaut. Dengan penyaluran CBP diharapkan dapat meringankan beban nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Arsana Yasa mengucapkan terima kasih atas respon cepat Pemkab Tabanan sehingga CBP segera bisa disalurkan.

• IST

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti secara simbolis serahkan CBP kepada nelayan di Pantai Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, Selasa (13/6).

Bupati Eka Wiryastuti mengaku mengusulkan kepada Perum Bulog divisi regional agar jatah cadangan beras pemerintah (CBP) untuk Kabupaten Tabanan dapat disalurkan kepada nelayan karena tak bisa melaut. "Ini adalah penyaluran Cadangan Beras Pemerintah yang kelima kalinya. Bantuan ini diberikan sebagai wujud kepedulian terhadap nelayan, kaum marhen," ungkap Bupati Eka. Selain penyerahan CBP, Bupati Eka juga penyerahan santunan klaim Asuransi Nelayan kepada ahli waris. @ d

Edisi : Rabu, 14 Juni 2017

Hal : 7

HARIAN UMUM NusaBali

Bupati Launching dan Salurkan PKH

PKH Diterima 2.960 KPM, Total Dana Rp 5,9 M Lebih

MANGUPURA, NusaBali

Bupati I Nyoman Giri Prasta melaunching dan menyalurkan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I tahun 2017 di Kabupaten Badung, bertempat di Wantilan Desa Adat Sangeh, Selasa (13/6). PKH ini merupakan program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu.

Untuk di Badung PKH tahun ini diterima sebanyak 2.960 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masing-masing mendapat Rp 500 ribu per triwulan, dengan total dana sebesar Rp 5,9 miliar lebih. Hadir pada kesempatan tersebut Ketua TP PKK Badung Ny Seniasih Giri Prasta, Ketua DWP Ny Nesya Yoga Segara, pimpinan OPD, pimpinan BNI 46 Wilayah Bali Nusra, Perwakilan Bank Indonesia dan OJK, Camat Abiansemal serta perbekel se-Abiansemal.

Bupati Giri Prasta menyampaikan terima kasih atas program Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sosial, kepada Bank BNI, BI, dan OJK.

● IST

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta (dua dari kiri) melaunching dan menyalurkan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I tahun 2017, bertempat di Wantilan Desa Adat Sangeh, Selasa (13/6).

PKH melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ke depan diharapkan dapat bersinergi dengan program Pemkab Badung. "Ini menjadi PR bagi Dinas Sosial, program pusat ini harus sharing dengan program Pemkab Badung sehingga ke depan masyarakat penerima manfaat tidak hanya menerima Rp 500 ribu per triwulan, namun dapat menerima bantuan lebih besar," harap bupati.

Bupati menjelaskan, pemerintah telah banyak mengeluarkan program kegiatan yang arahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di bidang sosial, setiap tahun telah dilaksanakan program bedah rumah, dan bantuan usaha ekonomi produktif maupun kelompok usaha bersama (KUBE). "Untuk bedah rumah kami bantu sebesar Rp 55 juta, rehab berat Rp 30 juta, dan rehab ringan Rp 15 juta, kami harapkan program bedah rumah tuntas di tahun 2018 nanti," tegasnya.

Selain itu, bupati juga berpesan kepada dinas terkait agar mendata keluarga kurang sejahtera di Badung, dimana salah satu anak dari keluarga itu akan dibiayai sekolah hingga tamat Sarjana S2, setelah lulus akan dijadikan pegawai di Pemkab Badung. "Anak ini nanti akan mengenyam pendidikan yang mumpuni sehingga menjadi tulang pungung keluarga, dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga."

Kepala Dinas Sosial Badung I Ketut Sudarsana melaporkan, PKH menyasar keluarga miskin dengan prioritas empat sasaran yaitu ibu hamil, anak sekolah, disabilitas berat, dan lansia di atas 70 tahun. Penyaluran PKH di Badung diberikan kepada 2.960 KPM, terdiri dari di Kecamatan Abiansemal sebanyak 1.140 KPM, Petang 743 KPM, Mengwi 780 KPM, Kuta Utara 108 KPM, Kuta 97 KPM, dan Kuta Selatan 92 KPM. "Penyaluran dana ini akan dilaksanakan hingga 15 Juni ini," katanya.

Bantuan sosial non tunai ini sebesar Rp 5,9 miliar lebih selama satu tahun, untuk empat kali pencairan. Selain itu Mensos juga memberi bantuan sosial bagi lansia sebesar Rp 225 juta, bantuan sosial disabilitas Rp 171 juta untuk Rp 57 orang, bantuan beras sejahtera sebesar Rp 2,5 miliar lebih untuk 8.895 KK dalam waktu satu tahun.

Pimpinan Wilayah BNI 46 Bali-Nusra I Putu Bagus Kresna mengatakan, BNI sebagai penyalur bantuan sosial non tunai di Bali, untuk tahun 2017 akan menyalurkan bansos ini di tiga daerah yakni Badung, Gianyar, dan Tabanan. "Atas nama keluarga besar BNI 46 kami haturkan terima kasih kepada Pemkab dan masyarakat Badung atas kerjasama yang telah dilakukan sehingga penyaluran bansos non tunai ini berlangsung lancar," katanya. **@ asa**

Edisi : pabu, 14 juni 2017

Hal : 14

HARIAN UMUM NusaBali

Tak Mau Disebut *Gabeng* Lagi

★ Pansus Aset Siap Kembali Usut Aset Pemprov di Bali Hyatt Sanur

Pansus Aset saat ini dibuat dengan pola khusus untuk pengungkapkan kasus per kasus

DENPASAR, NusaBali

Pengusutan aset Pemprov Bali di kawasan Hotel Bali Hyatt, Sanur, Denpasar Selatan yang terkesan *gabeng* (tak jelas) padahal sudah dua kali Pansus Aset dibentuk dengan pimpinan berbeda, membuat Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama 'panas'. Saat memimpin rapat Pansus Aset DPRD Bali dengan Pemprov Bali, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak Bali Hyatt di Gedung DPRD Bali, Rabu (13/6), Adi Wiryatama menegaskan Pansus Aset yang kali ini dibentuk tidak mau *gabeng* lagi.

Pertemuan Pansus Aset dengan eksekutif dan pihak terkait kemarin dari awal sampai akhir berlangsung tegang. Pansus Aset yang membidik aset Pemprov Bali 2,5 hektare di kawasan Hotel Bali Hyatt Sanur itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry, Ketua Pansus I Nyoman Adnyana, anggota Pansus I Nyoman Tirtawan, I Ketut Kariyasa Adnyana. Sementara dari Pemprov Bali hadir Karo Aset dan Keuangan Pemprov Bali Ida Bagus Ngurah Arda, mantan Karo Aset Pemprov Bali I Ketut Adiarsa, Sekkot Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Iswara, perwakilan BPN Wilayah Bali Subarjo, dan Kuasa Hukum PT Wyncor Ronny Jannis.

Adi Wiryatama berbicara kencang soal kinerja Pansus Aset yang tidak akan main-main. Dia sempat kecewa karena Sekda Tjok Pemayun yang diundang tak hadir. "Kenapa terus bilang izin tidak hadir. Besok kalau dipanggil wajib memastikan hadir. Ini masalah penting. Masalah aset rakyat Bali yang lama-kelamaan kalah dengan swasta," ujar politisi PDI Perjuangan yang mantan Bupati Tabanan 2 periode ini.

Adi Wiryatama mengatakan, Pansus Aset saat ini dibuat dengan pola khusus untuk pengungkapkan kasus per kasus. Yang utama diusut adalah aset Pemprov Bali di Bali Hyatt. "Mungkin kalau Pansus Aset sebelumnya *gabeng*, Pansus ini saya tegaskan serius," tegas politisi gaek yang Sekretaris Deperda DPD PDIP Bali ini. Adi Wiryatama bahkan menegaskan akan merekomendasikan agar diusut penegak hukum. "Bila perlu dalam mengusut kasus ini kami akan undang KPK," imbuhnya.

Karo Aset IB Arda lebih dulu angkat

Edisi : Rabu, 14 Juni 2017

Hal : 3

HARIAN UMUM
NusaBali

bicara menjelaskan kronologi aset Pemprov Bali di Bali Hyatt Sanur. Aset Pemprov Bali di Bali Hyatt yang akhirnya menjadi kepemilikan saham buat Pemprov Bali itu juga diungkap. Namun penjelasan IB Arda jadi terputus karena anggota Pansus Nyoman Tirtawan angkat bicara. "Banyak kejanggalan dan konspirasi dalam masalah aset Pemprov Bali ini," ujar politisi Partai NasDem Bali ini.

Tirtawan mengatakan ada 2,5 hektare aset Pemprov Bali di Bali Hyatt yang dengan mudah menjadi saham. Tirtawan mengatakan saat dijadikan saham melibatkan PT Sanur Bali Resort, Yayasan Bina Budaya. "Ada 200 lembar saham, sekarang kemana saham itu? Deviden kemana? Jelas ada perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara. Ini sudah bisa diusut sebagai tindak pidana korupsi," kata politisi asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ini.

Tirtawan menyebutkan dalam peralihan aset ada Permendagri Tahun 1972 yang memastikan pelepasan atau peralihan aset wajib atas seizin Mendagri. Dalam masalah aset Pemprov Bali di Bali Hyatt tidak ada. "Tidak pernah ada ada izin dari Mendagri," ungkap anggota Komisi I DPRD Bali ini.

Anggota Pansus Aset Kariyasa Adnyana tak kalah keras lagi. Politisi PDIP asal Desa Busungbiu Kabupaten Buleleng ini mengatakan, kronologi atas aset Pemprov Bali belum bisa diuji faktanya. "Bisa saja alurnya dibuat dengan alur yang nantinya terkesan tidak ada masalah. Karena kronologi ini tidak jelas siapa yang buat. Kalau BPN mau tolong Kanwil BPN suruh tanda tangan basah dengan stempel resmi BPN. Berani nggak?" tantang Kariyasa Adnyana.

Ketua Pansus Nyoman Adnyana kemarin meminta agar BPN memberikan data dan kronologi aset Pemprov Bali di Bali Hyatt kepada pimpinan dewan. Kemarin terungkap juga oleh pihak PT Wincorn pada peralihan Sekda atas nama I Wayan Sembah Subakti Tahun 1974, aset sudah dilepas. Adalah perwakilan PT Wincorn Ronny Jannis yang menunjukkan peralihan itu.

Namun anggota Pansus Aset Tirtawan mematahkannya. "Itu sudah batal demi hukum, lantaran bertentangan dengan aturan di atasnya yaitu Permendagri, yang mewajibkan adanya persetujuan Mnedagri untuk melepas aset," ujar Tirtawan.

Atas kondisi ini Adi Wiryatama menutup pertemuan dengan mengagendakan rapat kembali untuk menghadirkan Kanwil BPN Bali, Sekda Bali, dan PT Sanur Bali. **nat**

Edisi : Rabu, 14 Juni 2017

Hal : 3

HARIAN UMUM NusaBali

Bupati Eka Wiryastuti Serahkan 19,46 Ton CBP

TABANAN, NusaBali

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menyerahkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secara simbolis kepada perwakilan nelayan Tabanan di Pantai Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, Selasa (13/6). Penyerahan CBP tahun ini adalah yang kelima kalinya dengan total CBP yang disalurkan sebanyak 19,46 ton beras kepada 63 kelompok nelayan dengan jumlah anggota sebanyak 931 kepala keluarga atau 3.476 jiwa.

Bupati Eka Wiryastuti berharap dengan penyaluran CBP ini dapat mengurangi beban nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nelayan di Tabanan sejak beberapa bulan tak bisa melaut karena cuaca ekstrem, gelombang besar, dan angin kencang. Penyerahan CBP dihadiri Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Asisten II Setda Tabanan I Wayan Miarsana, Anggota DPRD Tabanan I Made Dirga, Perwakilan Bulog, Pewakilan PT Jasindo, para Kepala OPD, dan camat.

Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tabanan I Ketut Arsana Yasa melaporkan, adanya cuaca buruk, angin kencang, dan gelombang tinggi dari bulan Januari hingga Februari, berdampak kepada para nelayan. Selama cuaca buruk itu nelayan tidak bisa melaut. Dengan penyaluran CBP diharapkan dapat meringankan beban nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Arsana Yasa mengucapkan terima kasih atas respon cepat Pemkab Tabanan sehingga CBP segera bisa disalurkan.

• IST

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti secara simbolis serahkan CBP kepada nelayan di Pantai Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, Selasa (13/6).

Bupati Eka Wiryastuti mengaku mengusulkan kepada Perum Bulog divisi regional agar jatah cadangan beras pemerintah (CBP) untuk Kabupaten Tabanan dapat disalurkan kepada nelayan karena tak bisa melaut. "Ini adalah penyaluran Cadangan Beras Pemerintah yang kelima kalinya. Bantuan ini diberikan sebagai wujud kepedulian terhadap nelayan, kaum marhen," ungkap Bupati Eka. Selain penyerahan CBP, Bupati Eka juga penyerahan santunan klaim Asuransi Nelayan kepada ahli waris. @ d

Edisi : Rabu, 14 Juni 2017

Hal : 7

HARIAN UMUM NusaBali

Bupati Launching dan Salurkan PKH

PKH Diterima 2.960 KPM, Total Dana Rp 5,9 M Lebih

MANGUPURA, NusaBali

Bupati I Nyoman Giri Prasta melaunching dan menyalurkan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I tahun 2017 di Kabupaten Badung, bertempat di Wantilan Desa Adat Sangeh, Selasa (13/6). PKH ini merupakan program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu.

Untuk di Badung PKH tahun ini diterima sebanyak 2.960 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masing-masing mendapat Rp 500 ribu per triwulan, dengan total dana sebesar Rp 5,9 miliar lebih. Hadir pada kesempatan tersebut Ketua TP PKK Badung Ny Seniasih Giri Prasta, Ketua DWP Ny Nesya Yoga Segara, pimpinan OPD, pimpinan BNI 46 Wilayah Bali Nusra, Perwakilan Bank Indonesia dan OJK, Camat Abiansemal serta perbekel se-Abiansemal.

Bupati Giri Prasta menyampaikan terima kasih atas program Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sosial, kepada Bank BNI, BI, dan OJK.

● IST

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta (dua dari kiri) melaunching dan menyalurkan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I tahun 2017, bertempat di Wantilan Desa Adat Sangeh, Selasa (13/6).

PKH melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ke depan diharapkan dapat bersinergi dengan program Pemkab Badung. "Ini menjadi PR bagi Dinas Sosial, program pusat ini harus sharing dengan program Pemkab Badung sehingga ke depan masyarakat penerima manfaat tidak hanya menerima Rp 500 ribu per triwulan, namun dapat menerima bantuan lebih besar," harap bupati.

Bupati menjelaskan, pemerintah telah banyak mengeluarkan program kegiatan yang arahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di bidang sosial, setiap tahun telah dilaksanakan program bedah rumah, dan bantuan usaha ekonomi produktif maupun kelompok usaha bersama (KUBE). "Untuk bedah rumah kami bantu sebesar Rp 55 juta, rehab berat Rp 30 juta, dan rehab ringan Rp 15 juta, kami harapkan program bedah rumah tuntas di tahun 2018 nanti," tegasnya.

Selain itu, bupati juga berpesan kepada dinas terkait agar mendata keluarga kurang sejahtera di Badung, dimana salah satu anak dari keluarga itu akan dibiayai sekolah hingga tamat Sarjana S2, setelah lulus akan dijadikan pegawai di Pemkab Badung. "Anak ini nanti akan mengenyam pendidikan yang mumpuni sehingga menjadi tulang pungung keluarga, dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga."

Kepala Dinas Sosial Badung I Ketut Sudarsana melaporkan, PKH menyasar keluarga miskin dengan prioritas empat sasaran yaitu ibu hamil, anak sekolah, disabilitas berat, dan lansia di atas 70 tahun. Penyaluran PKH di Badung diberikan kepada 2.960 KPM, terdiri dari di Kecamatan Abiansemal sebanyak 1.140 KPM, Petang 743 KPM, Mengwi 780 KPM, Kuta Utara 108 KPM, Kuta 97 KPM, dan Kuta Selatan 92 KPM. "Penyaluran dana ini akan dilaksanakan hingga 15 Juni ini," katanya.

Bantuan sosial non tunai ini sebesar Rp 5,9 miliar lebih selama satu tahun, untuk empat kali pencairan. Selain itu Mensos juga memberi bantuan sosial bagi lansia sebesar Rp 225 juta, bantuan sosial disabilitas Rp 171 juta untuk Rp 57 orang, bantuan beras sejahtera sebesar Rp 2,5 miliar lebih untuk 8.895 KK dalam waktu satu tahun.

Pimpinan Wilayah BNI 46 Bali-Nusra I Putu Bagus Kresna mengatakan, BNI sebagai penyalur bantuan sosial non tunai di Bali, untuk tahun 2017 akan menyalurkan bansos ini di tiga daerah yakni Badung, Gianyar, dan Tabanan. "Atas nama keluarga besar BNI 46 kami haturkan terima kasih kepada Pemkab dan masyarakat Badung atas kerjasama yang telah dilakukan sehingga penyaluran bansos non tunai ini berlangsung lancar," katanya. **@ asa**

Edisi : pabu, 14 juni 2017

Hal : 14